

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Secara umum, penelitian ini menganalisis perbandingan/perbedaan kinerja keuangan, akuntabilitas, serta transparansi laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

A. Hasil Pengujian Variabel Kinerja Keuangan

Hasil pengujian terhadap subvariabel kinerja keuangan, atas perhitungan analisis rasio-rasio keuangan memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual lebih rendah dibandingkan rasio likuiditas sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.
2. Rasio solvabilitas pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual lebih rendah dibandingkan rasio solvabilitas sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.
3. Rasio utang pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual lebih tinggi dibandingkan rasio utang sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

4. Rasio pertumbuhan pendapatan pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual lebih tinggi dengan rasio pertumbuhan pendapatan sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.
5. Rasio derajat desentralisasi pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual tidak berbeda dengan rasio derajat desentralisasi sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.
6. Rasio kemandirian keuangan daerah pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual lebih tinggi dengan rasio kemandirian keuangan daerah sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.
7. Rasio efektivitas PAD pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual tidak berbeda dibandingkan rasio efektivitas PAD sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.
8. Rasio efektivitas pajak daerah pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual lebih tinggi dibandingkan rasio efektivitas pajak daerah sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.
9. Rasio efisiensi belanja pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual lebih tinggi dengan rasio efisiensi belanja sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

10. Rasio derajat kontribusi BUMD pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual tidak berbeda dengan rasio derajat kontribusi BUMD sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.
11. Rasio belanja operasi pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual lebih tinggi dibandingkan rasio belanja operasi sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.
12. Rasio belanja modal pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual lebih tinggi dibandingkan rasio belanja modal sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.
13. Rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual lebih rendah dibandingkan rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.
14. Rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas investasi nonkeuangan pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual lebih tinggi dibandingkan rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas investasi nonkeuangan sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.
15. Rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis

akrual lebih tinggi dibandingkan rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

16. Rasio pertumbuhan arus kas bebas pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual lebih rendah dibandingkan rasio pertumbuhan arus kas bebas sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

B. Hasil Pengujian Variabel Akuntabilitas

Akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual lebih tinggi dibandingkan akuntabilitas pada laporan keuangan sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

C. Hasil Pengujian Variabel Transparansi

Transparansi pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual lebih tinggi dibandingkan transparansi laporan keuangan sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

5.2. Implikasi

1. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memberikan gambaran bagi semua pihak yang terkait, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan implementasi SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan. Dalam hal ini agar

pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan serta dapat mengambil strategi atau keputusan terbaik sehingga implementasi SAP berbasis akrual dapat berjalan sesuai dengan standar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta dapat menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan, akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan dalam rangka mewujudkan *clean government and good governance*.

2. Secara teoritis, sebagai khazanah ilmu pengetahuan dalam hal perkembangan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia.

5.3. Saran Penelitian

1. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambah periode waktu penelitian agar dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Indonesia.